

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh Jaya

Zari Marfitri¹, Dewi Sartika², Rimal Mahdani³, Cut Sri Firman Hastuti⁴
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: zarima147@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-07-2026
Disetujui 17-07-2026
Diterbitkan 19-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing the allocation of education expenditure at the Education Office of Aceh Jaya Regency. In Indonesia, regional governments are required to allocate at least 20% of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to education, excluding educators' salaries and official education expenses, to improve access to and the quality of education. Aceh Jaya Regency depends heavily on intergovernmental transfers, including the Aceh Special Autonomy Fund (DOK), the Special Allocation Fund (DAK), and the General Allocation Fund (DAU), whose fluctuations may affect education budget allocation. This study employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the budget realization reports of the Education Office for the 2010–2024 fiscal years. Data were analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that, partially, the Aceh Special Autonomy Fund (DOK), the Special Allocation Fund (DAK), and the General Allocation Fund (DAU) each have a significant effect on the allocation of education expenditure. Simultaneously, these three funding sources have a positive and significant influence on education expenditure allocation, with significance values below 0.05. Therefore, the study concludes that DOK, DAK, and DAU jointly play an important role in determining education expenditure allocation in Aceh Jaya Regency, supporting the acceptance of the proposed hypothesis (H4).

Keywords: Aceh Special Autonomy Fund, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Education Expenditure Allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Sesuai ketentuan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Fluktuasi penerimaan ketiga dana tersebut berpotensi memengaruhi besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan setiap tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan rekapitulasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2010–2024 yang diperoleh melalui dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DOK, DAK, dan DAU masing-masing berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja pendidikan, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa DOK,

DAK, dan DAU secara bersama-sama memengaruhi alokasi belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan diterima.

Katakunci: Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Alokasi Belanja Pendidikan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Marfit, Z., Sartika, D., Mahdani, R., & Hastuti, C. S. F. . (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh Jaya. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 8657-8674. <https://doi.org/10.63822/fhwqpr43>

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat (Boky, 2023).

Memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, pemerintah pusat memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah (Pemda). Khususnya dalam hal keuangan. Pemerintah Pusat (Perpus) melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar berlainan satu dengan yang lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Abdullah, et al. 2015).

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (Fahrianti & Saleh, 2021). Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Anggaran pemerintah dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah, anggaran bukan sebagai alat perencanaan saja, namun anggaran merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana publik yang dibebankan kepada pemerintah (Ritonga, 2021).

Pendanaan yang dianggarkan pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung maksimalnya pendidikan pada suatu daerah bisa berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja pendidikan merupakan salah satu jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam belanja pendidikan, anggaran yang dialokasikan dari APBD sekurang-kurangnya adalah 20% dari belanja daerah diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk pendidikan sebesar kurang lebih 20% ini tentunya memiliki arah kebijakan dalam peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah untuk memenuhi belanja daerahnya salah satunya dengan dana perimbangan (Yunina & Handayani 2018).

Meskipun aspek pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan, namun dunia pendidikan di Indonesia dinilai masih bermasalah, karena masih dijadikan sebagai komoditi yang mahal. Hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak sebandingnya mutu pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Permasalahan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat berimbas terhadap tingkat pendidikan di daerah, seperti di Aceh yang kualitas pendidikannya masih tertinggal dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun di sisi lain, belanja di sektor pendidikan justru semakin meningkat tiap tahun (Yunina & Handayani, 2018). Pada dasarnya pengalokasian dana pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sangat ditentukan oleh besarnya APBA yang diperoleh Pemerintah Aceh pada suatu tahun anggaran, terutama APBA yang bersumber dari

dana otonomi khusus, karena pendanaan bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pengalokasian dana otonomi khusus sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Berdasarkan sumber data dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.
**DOK, DAK, DAU dan alokasi belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020-2024**

Tahun	Alokasi Belanja Pendidikan	Dana Otonomi Khusus	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Umum
2020	164.764.244.761	15.271.736.903	21.639.715.000	108.211.803.751
2021	183.265.345.728	7.577.103.587	21.639.715.000	103.111.803.754
2022	188.904.482.619	12.300.137.040	22.484.163.000	109.111.803.755
2023	193.750.250.250	4.230.000.000	5.618.595.000	107.632.861.856
2024	198.506.372.802	499.963.600	5.339.641.000	128.307.969.468

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh Jaya, 2024

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana Otsus dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari Rp. 15.271.736.903,- tahun 2020 menjadi Rp. 499.963.600,- di tahun 2024. Untuk dana alokasi khusus juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.639.715.000,- menjadi Rp. 5.339.641.000,- tahun 2024. Sedangkan dana alokasi umum mengalami peningkatan dari Rp. 108.211.803.751,- di tahun 2020 menjadi Rp. 128.307.969.468,- di tahun 2024. Terjadinya fluktuasi pada dana otonomi khusus dikarenakan setiap tahun, pemerintah daerah bisa saja mengubah fokus pembangunan berdasarkan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, misalnya infrastruktur, kesehatan, atau pemulihan pascabencana, sehingga alokasi untuk pendidikan naik turun. Dana tersedia tetapi tidak terserap maksimal karena perencanaan yang kurang matang, keterlambatan proyek, atau rendahnya kapasitas teknis pelaksana. Ini bisa membuat alokasi tahun berikutnya disesuaikan,

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk sektor pendidikan. Dalam UU Otsus, pendidikan sering menjadi sektor prioritas untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia (Hartati, et al., 2016). Dengan adanya alokasi khusus untuk pendidikan dari Dana Otsus di Dinas Pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya, beberapa indikator pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, dan akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan meningkat.

DOK merupakan sumber pendanaan utama bagi Aceh dalam mendukung sektor pendidikan. DOK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, termasuk sektor pendidikan, di kabupaten/kota di Aceh selama periode 2010–2017. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa DOK tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang dan jasa di Aceh, yang mencakup belanja pendidikan (Amelia et al., 2019).

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, dana ini sering digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar kurang mampu atau mendukung pendidikan berbasis agama. Meski dana tersedia, tantangan seperti korupsi, ketidak efisienan dalam pengelolaan dana, dan kurangnya perencanaan strategis sering menjadi kendala dalam memaksimalkan dampak belanja pendidikan. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan dana benar-benar dialokasikan dan digunakan sesuai tujuan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu Tafalas & Umpain (2024) menunjukkan bahwa alokasi dana Otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap bidang pendidikan dalam hal ini rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat.

DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional, daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yaitu kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (Sanggелorang, et al., 2019). Dalam konteks pendidikan, DAK digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan fasilitas, dan peningkatan mutu pembelajaran di daerah. DAK sektor pendidikan dialokasikan untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan (misalnya, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas), serta program pengembangan kualitas guru dan siswa.

DAK dirancang untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di daerah, termasuk pendidikan. Penelitian oleh Febriani & Asmara (2018) menemukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal fungsi pendidikan di kabupaten/kota di Aceh. Namun, studi oleh Amelia et al., (2019), menunjukkan bahwa DAK secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan, meskipun secara keseluruhan tetap berkontribusi positif terhadap outcomes pendidikan.

Bentuk keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Al Qadar, et al., 2017). DAK membantu daerah, terutama daerah yang fiskalnya terbatas, untuk membiayai belanja pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Melalui DAK, pemerintah pusat memastikan agar prioritas pembangunan nasional di sektor pendidikan (misalnya, wajib belajar 12 tahun) dapat diimplementasikan di daerah. Akan tetapi terjadinya ketidaksesuaian antara prioritas pemerintah pusat dan kebutuhan nyata daerah. Rendahnya penyerapan DAK pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya sering terjadi akibat perencanaan yang lemah atau kendala teknis dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan yang kurang optimal terhadap penggunaan DAK dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran.

Selain DAK, dana alokasi umum (DAU) juga dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan. Menurut Kustianingsih, et al (2018) DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat tidak terikat, artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah tersebut. DAU memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Mendukung Belanja Wajib Pendidikan: Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, daerah wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. DAU menjadi salah satu sumber utama untuk memenuhi kewajiban ini (Mokorimban, et all, 2021).

Karena sifatnya yang tidak terikat, DAU di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan fasilitas, pembayaran gaji guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagian besar DAU digunakan untuk membayar gaji aparatur daerah, termasuk guru, yang menjadi salah satu komponen utama belanja pendidikan. Sebagian dari DAU dapat dialokasikan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas sekolah, terutama di daerah yang minim infrastruktur. DAU mendukung program pelatihan guru, penyediaan sarana pembelajaran, dan program pengembangan siswa.

Akan tetapi alokasi DAU untuk pendidikan tidak efisien, misalnya anggaran yang tidak sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yunina & Handayani (2018), dengan objeknya adalah pengalokasian belanja pendidikan, yang bertujuan untuk diuji faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja pendidikan tersebut, dengan faktor yang digunakan adalah dana otonomi khusus, dan dana alokasi khusus (DAK). Hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, dana otonomi khusus, DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh sebesar 75%.

Kabaruan penelitian ini adalah peneliti mengambil studi kasus di Kabupaten Aceh Jaya, wilayah dengan karakteristik unik terkait penerimaan Dana Otsus sebagai bagian dari hasil perjanjian damai (MoU Helsinki). Jika pada penelitian terdahulu, hanya fokus pada satu jenis dana, DAK atau DAU saja, namun pada penelitian ini menggabungkan ketiga variabel DOK, DAK dan DAU) dalam satu model analisis sehingga memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengaruh relatif masing-masing dana terhadap belanja pendidikan. Penelitian ini lebih spesifik, yaitu mengamati alokasi yang benar-benar masuk ke Dinas Pendidikan, sehingga lebih tepat dalam mengukur hubungan antara dana transfer pusat dan belanja sektoral pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2010–2024 yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Seluruh data selama periode penelitian digunakan sebagai sampel dengan teknik total sampling, sehingga diperoleh 15 data observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja pendidikan, sedangkan variabel independennya meliputi Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap alokasi belanja pendidikan, uji simultan (uji F) untuk menguji pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi alokasi belanja pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum dan rata-rata. Tabel berikut adalah statistik deskriptif dan variabel independen yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) variabel dependen yaitu Alokasi Belanja Pendidikan.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics			
		Alokasi Belanja Pendidikan	Dana Otonomi Khusus	Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Umum
N	Valid	15	15	15	15
	Missing	0	0	0	0
Mean		135270959386,47	5650199882,07	9248809511,73	93131809689,40
Median		121276895391,00	4230000000,00	7130218660,00	93418435863,00
Mode		86111736203 ^a	499963600 ^a	21639715000	62218516752 ^a
Std. Deviation		39652307388,663	5401376098,799	7926709708,992	18177604746,995
Minimum		86111736203	499963600	1017860074	62218516752
Maximum		198506372802	15271736903	22484163000	128307969468

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 sampel (N). Berdasarkan penelitian selama periode 2010-2024, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Otonomi Khusus (X_1), Dana Alokasi Khusus (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3), sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah Alokasi Belanja Pendidikan (Y).

1. Nilai rata-rata (mean) Alokasi Belanja Pendidikan (Y) sebesar Rp 135.270.959.386,47, dengan nilai minimum Rp 861.117.362,03 dan maksimum Rp 198.506.372.802,00. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar tahun atau periode pengamatan, sebagaimana terlihat dari nilai standar deviasi yang tinggi sebesar Rp 39.652.307.388,66.
2. Dana Otonomi Khusus (DOK) (X_1), diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 56.501.998.82,07, dengan nilai minimum Rp 4.999.636.00 dan maksimum Rp 152.717.369.03. Nilai median sebesar Rp 42.300.000.000,00 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di bawah rata-rata, menandakan adanya beberapa nilai tinggi (outlier) yang memengaruhi rata-rata.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) (X_2), memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 92.480.951.1,73, dengan median Rp 71.302.186.60,00, nilai minimum Rp 21.639.715.00,00, dan maksimum Rp 224.841.630.00,00. Nilai standar deviasi yang cukup besar (Rp 79.267.097.08,99) juga menunjukkan adanya penyebaran data yang luas antar periode.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3), memiliki rata-rata sebesar Rp 93.131.809.689,40 dengan median Rp 93.418.435.863,00, yang berarti distribusi data cukup seimbang karena nilai rata-rata dan median relatif berdekatan. Nilai minimum sebesar Rp 62.218.516.752,00 dan maksimum Rp 128.307.969.468,00, serta standar deviasi Rp 18.177.604.746,99, menunjukkan bahwa fluktuasi nilai DAU antar periode relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat variasi antar variabel dana transfer tersebut. Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus menunjukkan variasi yang tinggi, sedangkan Dana Alokasi Umum relatif lebih stabil. Variasi pada variabel-variabel ini diduga dapat memengaruhi tingkat Alokasi Belanja Pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,05818778
	Absolute	,159
Most Extreme Differences	Positive	,159
	Negative	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		,614
Asymp. Sig. (2-tailed)		,845

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas residual merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi linier berganda agar hasil estimasi parameter regresi menjadi valid dan tidak bias. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa:

- 1) Nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* = 0,614
- 2) Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,845

Karena nilai signifikansi sebesar 0,845 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Artinya, penyebaran data dalam model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang menguji pengaruh Dana Otonomi Khusus, DAK, dan DAU terhadap Alokasi Belanja Pendidikan memiliki distribusi residual yang normal, dan tidak terdapat penyimpangan terhadap asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan interpretasi hubungan antar variabel menjadi tidak akurat:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Dana Otonomi Khusus (X_1)	0,628	1,593	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Alokasi Khusus (X_2)	0,589	1,699	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Alokasi Umum (X_{3_2})	0,617	1,621	Tidak terjadi multikolinieritas

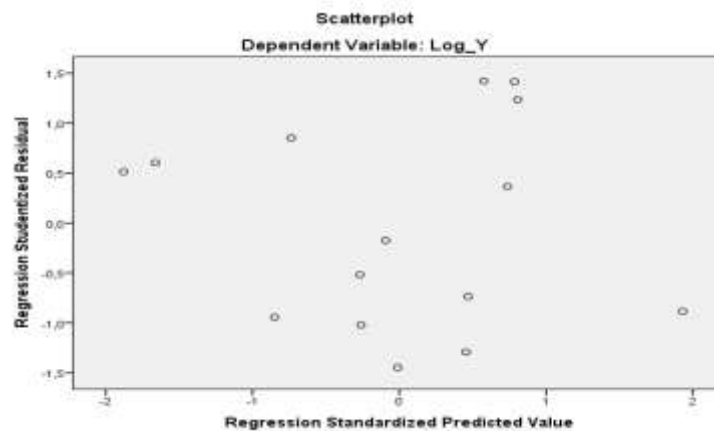
Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah jika Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil di atas, seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan seluruh nilai VIF berada di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Hal ini berarti bahwa Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang

tidak saling tumpang tindih secara berlebihan dan masing-masing variabel dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap Alokasi Belanja Pendidikan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada *Scatterplot*, dimana hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini menggunakan *Durbin Watson*. Hasil dari uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji *Durbin Watson* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,884 ^a	,782	,722	,06564	1,077

a. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X1, Log_X2

b. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Dengan nilai DW = 1,077, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang serius dalam model. Nilai ini memang sedikit di bawah 2, namun masih berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak menunjukkan adanya autokorelasi positif yang kuat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi, sehingga hasil analisis regresi yang diperoleh dapat dipercaya dan memenuhi syarat asumsi klasik.

Uji Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,845	2,502	
	Log_X1	-,031	,039	-,140
	Log_X2	,415	,445	,460
	Log_X3	1,287	,252	,917

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Dari hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$= 2,845 - 0,031X_1 + 0,415X_2 + 1,287X_3 + \epsilon$$

- a. Konstanta (α) = 2,845

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum) bernilai nol, maka Alokasi Belanja Pendidikan memiliki nilai dasar sebesar 2,845 satuan logaritma. Nilai ini menggambarkan besarnya alokasi belanja pendidikan yang terbentuk dari faktor-faktor lain di luar model penelitian.

- b. Koefisien Dana Otonomi Khusus (β_1) = -0,031

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan logaritma Dana Otonomi Khusus (X_1) akan menyebabkan penurunan Alokasi Belanja Pendidikan (Y) sebesar 0,031 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara Dana Otonomi Khusus dan Alokasi Belanja Pendidikan, namun dari hasil uji t sebelumnya diketahui bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, perubahan dalam Dana Otonomi Khusus belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan atau penurunan alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya.

- c. Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) (β_2) = 0,415

Koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan logaritma Dana Alokasi Khusus (X_2) akan meningkatkan Alokasi Belanja Pendidikan (Y) sebesar 0,415 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar dana DAK yang diterima, maka semakin tinggi pula anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh DAK ini positif dan signifikan, sehingga DAK menjadi salah satu sumber pendanaan yang berperan penting dalam mendukung peningkatan belanja sektor pendidikan.

- d. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) (β_3) = 1,287

Koefisien regresi sebesar 1,287 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan logaritma Dana Alokasi Umum (X_3) akan meningkatkan Alokasi Belanja Pendidikan (Y) sebesar 1,287 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang paling besar di antara variabel

lain ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi besarnya alokasi belanja pendidikan. Hasil uji t juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, yang berarti peningkatan DAU secara nyata mendorong peningkatan anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya.

1. Uji t (Parsial)

Uji t dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antara variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap belanja modal (Y). Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,845	2,502		1,137	,280
1 Log_X1	-,031	,039	-,140	-,788	,447
Log_X2	,415	,445	,460	3,328	,009
Log_X3	1,287	,252	,917	5,111	,000

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel sebesar 1,78229 pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Selain itu, pengambilan keputusan juga didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.). Hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap Alokasi Belanja Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dana Otonomi Khusus (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,447 > 0,05, sehingga secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan. Hal ini diperkuat dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel (1,78229), sehingga hipotesis ditolak. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,031 menunjukkan bahwa peningkatan Dana Otonomi Khusus cenderung menurunkan Alokasi Belanja Pendidikan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
- Dana Alokasi Khusus (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,78229), sehingga hipotesis diterima. Koefisien regresi sebesar 0,415 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan logaritma Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Alokasi Belanja Pendidikan sebesar 0,415 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Dana Alokasi Umum (X_3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,78229), sehingga hipotesis diterima. Koefisien regresi sebesar 1,287 menunjukkan bahwa peningkatan 1 satuan logaritma Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Alokasi Belanja Pendidikan sebesar 1,287 satuan.

2. Uji Signifikan Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,170	3	,057	13,131	,001 ^b
	Residual	,047	11	,004		
	Total	,217	14			

a. Dependent Variable: Log_Y

b. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X1, Log_X2

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,131 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditoleransi, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah layak. Selain itu, nilai F hitung (13,131) lebih besar daripada F tabel (3,982), sehingga H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Koefisien (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,884 ^a	,782	,722	,06564

a. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X1, Log_X2

b. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Output data SPSS Tahun 2025

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,722 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum dalam menjelaskan variasi Alokasi Belanja Pendidikan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel adalah sebesar 72,2%. Hal ini berarti bahwa perubahan Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut sebesar 72,2%, sedangkan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain.

Pembahasan

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0,447 > \alpha =$

0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,031. Dengan demikian, secara statistik DOK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja pendidikan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap alokasi belanja pendidikan ditolak.

Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,031 menunjukkan bahwa secara parsial peningkatan Dana Otonomi Khusus tidak diikuti dengan peningkatan alokasi belanja pendidikan, bahkan cenderung menurunkannya, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tambahan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus belum secara langsung dialokasikan atau dimanfaatkan untuk belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.

Secara faktual, Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh memiliki karakteristik penggunaan yang relatif luas dan tidak terbatas hanya pada sektor pendidikan. DOK juga digunakan untuk membiayai sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta belanja sosial. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kompetisi antar sektor dalam pengalokasian anggaran, sehingga sektor pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama meskipun kebutuhan pendidikannya relatif besar. Akibatnya, peningkatan DOK tidak secara otomatis meningkatkan alokasi belanja pendidikan di tingkat kabupaten.

Secara kelembagaan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus di tingkat daerah sering kali dipengaruhi oleh kebijakan politik anggaran dan prioritas pembangunan jangka pendek pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Aceh Jaya, DOK berpotensi lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan ekonomi daerah, mengingat karakteristik wilayah yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan akses, serta kebutuhan pembangunan fisik yang relatif tinggi. Hal ini menyebabkan belanja pendidikan tidak menjadi sasaran utama pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di wilayah lain yang menerima Dana Otonomi Khusus. Penelitian di Papua menunjukkan bahwa meskipun Dana Otonomi Khusus dialokasikan dalam jumlah besar, pengelolaannya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (Suardi, 2021). Sementara itu, penelitian Mukhsin et al. (2023) di Provinsi Aceh menemukan bahwa DOK sektor pendidikan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, namun fokus kajian tersebut lebih menempatkan pendidikan sebagai instrumen sosial-ekonomi, bukan secara spesifik pada besaran alokasi belanja pendidikan daerah. Perbedaan fokus ini memungkinkan terjadinya perbedaan hasil dan implikasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Jaya, Dana Otonomi Khusus belum berfungsi optimal sebagai instrumen fiskal yang secara langsung mendorong peningkatan alokasi belanja pendidikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan tata kelola anggaran, kejelasan peruntukan Dana Otonomi Khusus, serta integrasi kebijakan antara DOK, DAK, dan DAU agar alokasi belanja pendidikan dapat lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

Dana Alokasi Khusus (X_2) memiliki nilai Sig. sebesar $0,009 < 0,05$, artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan. Koefisien regresi sebesar 0,415 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan logaritma DAK akan meningkatkan Alokasi Belanja Pendidikan sebesar 0,415 satuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki koefisien sebesar 0,415 dan signifikansi 0,009 ($<0,05$), yang berarti bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja

pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Artinya, peningkatan DAK secara logaritma dikaitkan dengan peningkatan logaritma alokasi belanja pendidikan: semakin besar DAK, maka semakin besar belanja pendidikan yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen DAK terbukti menjadi salah satu sumber pendanaan yang efektif untuk meningkatkan belanja pendidikan dalam konteks lokal kabupaten Aceh Jaya.

Secara kontekstual, DAK dalam sistem desentralisasi di Indonesia diberikan dengan syarat khusus dan sering diarahkan untuk program-tertentu atau belanja fisik/non-fisik di bidang pendidikan. Penelitian oleh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan menemukan bahwa model pengelolaan masih banyak bersifat input-oriented dan kurang berbasis output sehingga aspek kebutuhan daerah kurang tercerminkan (Sulaeman & Adriyanto, 2021). Namun di Kabupaten Aceh Jaya penelitian ini menunjukkan bahwa DAK sudah memiliki efek yang nyata terhadap belanja pendidikan, yang berarti bahwa mekanisme alokasi DAK di kabupaten tersebut tampaknya lebih responsif terhadap kebutuhan belanja pendidikan.

Selain itu, data nasional menunjukkan bahwa porsi transfer DAK ke pendidikan cukup besar dan menjadi bagian penting dari anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (Elvira, 2023). Meskipun Sulaeman & Adriyanto (2021) mengkritisi bahwa pengelolaan DAK masih bersifat *input-oriented*, hasil penelitian di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa DAK tetap mampu mendorong peningkatan alokasi belanja pendidikan secara nyata, meskipun efektivitas output masih memerlukan evaluasi lanjutan.

Hasil penelitian di Aceh Jaya sejalan dengan struktur nasional bahwa DAK memang berperan penting dalam pembiayaan pendidikan. Namun demikian, masih perlu diwaspadai bahwa meskipun DAK berpengaruh positif, kualitas penggunaan dan efektivitasnya dalam meningkatkan hasil pendidikan (misalnya mutu, akses, atau sarana) belum tentu sama dengan peningkatan belanja. Di sinilah penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi bagaimana belanja yang bersumber dari DAK di Kabupaten Aceh Jaya dikonversi ke output pendidikan dan bagaimana monitor evaluasi belanja tersebut dilakukan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki koefisien sebesar 1,287 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang paling besar dari ketiga variabel independen terhadap alokasi belanja pendidikan. Artinya, peningkatan proporsional DAU akan berdampak paling besar dalam meningkatkan alokasi belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Ini menunjukkan bahwa dana transfer umum (DAU) masih sangat penting dan dominan dalam mendukung belanja pendidikan di pemerintahan kabupaten.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, DAU merupakan dana transfer non-spesifik yang dapat digunakan oleh daerah untuk berbagai kebutuhan inklusif, termasuk pendidikan. Karena fleksibilitasnya, DAU memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke sektor yang dianggap prioritas termasuk belanja pendidikan. Data nasional menunjukkan bahwa DAU bersama DAK merupakan bagian besar dari anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (Siahaan, 2022).

Penelitian Mokorimban et al. (2021) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini menegaskan bahwa DAU sebagai dana transfer yang bersifat fleksibel memberikan ruang yang besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas belanja, termasuk pendidikan. Selain itu, temuan ini juga mendukung pandangan Korain et al. (2023) dan Siahaan (2022) yang menyatakan bahwa transfer fiskal, khususnya DAU, merupakan sumber utama pembiayaan pendidikan di daerah. Dengan fleksibilitas penggunaannya, DAU memungkinkan pemerintah

daerah menyesuaikan alokasi belanja pendidikan dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks Kabupaten Aceh Jaya, dominannya pengaruh DAU menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pendidikan sangat menentukan besarnya belanja pendidikan, terlepas dari keterbatasan dana khusus lainnya.

Kabupaten Aceh Jaya, hasil ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pendidikan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar DAU yang diterima dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan pendidikan dalam penggunaan DAU. Namun demikian, hasil ini juga mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan belanja pendidikan melalui DAU bukan sekadar kuantitas belanja, melainkan diarahkan ke kualitas pendidikan yang lebih baik misalnya pengembangan sumber daya manusia, kualitas guru, sarana-prasarana, maupun layanan pendidikan yang merata. Dengan dominasi pengaruh DAU, diperlukan tata kelola yang baik agar dana tersebut benar-benar mendukung peningkatan pendidikan yang bermakna.

Pengaruh dana otonomi khusus, dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,131 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai yang diperoleh lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditolerir yaitu 0,05. dan $R^2 = 0,782$ yang menunjukkan bahwa 78,2% variasi belanja pendidikan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa menerima H_3 yang artinya variabel bebas (dana otonomi khusus, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yakni alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.

Hal ini memperkuat bahwa meskipun secara parsial DOK tidak signifikan, secara kolektif ketiga jenis dana transfer ini tetap memiliki peran penting dalam menentukan besaran belanja pendidikan kabupaten. Artinya, kombinasi alokasi dana dari berbagai jenis transfer harus dipandang sebagai satu rangkaian kebijakan fiskal daerah yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Aceh Jaya, hasil ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak hanya bergantung pada satu jenis dana saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara berbagai dana transfer. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan integrasi dan prioritas alokasi dari masing-masing dana (DOK, DAK, DAU) agar efektivitas belanja pendidikan meningkat. Kebutuhan khusus daerah seperti Aceh Jaya misalnya akses di daerah terpencil, infrastruktur pendidikan, atau program unggulan memerlukan distribusi dana yang terkoordinasi antar jenis dana.

Penelitian terdahulu di wilayah lain juga menunjukkan bahwa dana perimbangan dan transfer fiskal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau kinerja pendidikan secara umum. Misalnya penelitian di Papua Barat menunjukkan bahwa DOK dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Tuakara, 2024) Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa dalam konteks belanja pendidikan lokal, mekanisme transfer fiskal memang penting dan perlu dipahami secara simultan, bukan hanya dalam analisis satu-per-satu.

Sebagai implikasi, agar sinergi antar dana transfer dapat efektif, pemerintah kabupaten dan dinas pendidikan perlu merancang mekanisme alokasi yang mempertimbangkan kontribusi dan karakteristik masing-masing dana, melakukan monitoring yang terintegrasi, dan memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan secara komplementer untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya penggunaan DOK untuk kebutuhan spesifik atau daerah tertinggal, DAK untuk program terpadu belanja pendidikan, dan DAU untuk fleksibilitas penganggaran pendidikan sesuai prioritas daerah.

Dengan demikian, meskipun DOK secara parsial tidak signifikan, keberadaannya tetap berkontribusi dalam struktur pembiayaan pendidikan ketika dikombinasikan dengan DAK dan DAU. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya merupakan hasil dari interaksi dan sinergi antar berbagai jenis dana transfer, bukan bergantung pada satu sumber dana saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Secara parsial Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.
2. Secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya.
4. Secara simultan, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Pendidikan

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya
Dinas Pendidikan perlu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, khususnya Dana Otonomi Khusus dan DAK, agar lebih terarah pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala serta penguatan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah guna memastikan pemanfaatan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan transparan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan penganggaran yang memprioritaskan sektor pendidikan dengan mengintegrasikan DOK, DAK, dan DAU secara optimal dalam RKPD dan APBK. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi berbasis hasil serta mendorong inovasi pendanaan agar pembiayaan pendidikan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti PAD, Dana Desa, dan faktor sosial ekonomi, serta menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau pendekatan data panel antar daerah. Selain itu, penggunaan metode kualitatif atau mixed methods dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., Hartati, C. S. & Saputra, M. (2016). Pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).

- Al Qadar, Azis. Noholo, Sahmin dan Yusuf, Nilawaty. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. *KTM Fakutas Ekonomi & Bisnis*, 2(1).
- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap outcomes bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 48-69.
- Boky, N. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3).
- Elvira. (2023). Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan: Model Pengelolaan Berdasarkan Sistem Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2).
- Fahrianti, S., & Saleh, M. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003-2015. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 323-330.
- Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus terhadap Belanja Moda Fungsi Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 585–599.
- Hartati, Sri, Syukri Abdullah, Mulia Saputra. (2016). Pengaruh Penerimaan Dana Otonom Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada IPM Kabupaten/Kota Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*. Volume 5. No 2. Banda Aceh.
- Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 193-212.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Mokorimban, E. Y., Engka, D. S., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(4), 19-35.
- Mukhsin, M. M., Seftarita, C., Riswandi, R., Farlian, T., & Faiziah, A. (2023). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(4), 263-272.
- Ritonga, S. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. ISSN: 2614-3097. Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021.
- Sanggelorang, S., Rumat, V., & Siwu, H. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Siahaan, A. (2022). Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 64-74.
- Siswanto, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal UNNES*, 1-15.
- Suardi, W. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Pada Sektor Pendidikan Di Kabupaten Merauke* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

-
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175-200.
- Tafalas, M. G., & Umpain, J. J. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Sektor Pendidikan Di Provinsi Papua Barat. *Develop*, 8(2), 121-135.
- Tuakara, Y. (2024). Dampak Kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence & Digital Business*, 4(1).
- Yunina, F., & Handayani, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1).